

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pemberdayaan

1. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logis sebagai berikut: 1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi, 2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran, 3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi, dan 4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).¹⁹

Menurut Mubyarto, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan

¹⁹Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000) hal. 1-2

mendinamisasikan potensinya. Bertolak dari hal itu, tidak hanya ekonomi yang meningkat tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri.²⁰

Proses pemberdayaan masyarakat miskin menurut Pranarka dan Moeldjarto, dapat dilakukan secara bertahap dalam tiga fase yaitu: pertama, fase finansial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi rakyat. Kedua, fase partisipatoris adalah proses pemberdayaan dari pemerintah bersama masyarakat yang sudah dilibatkan secara aktif untuk menuju kemandirian. Ketiga, fase emansipatif, adalah proses pemberdayaan dari rakyat dan untuk rakyat yang didukung pemerintah bersama rakyat. Paradigma pemberdayaan tersebut akan mendorong kemampuan pemberdayaan perempuan untuk memperoleh hak-hak ekonomi, sosial, dan politik dalam meningkatkan kemandirian perempuan.²¹

Menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari tujuh tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:²²

- a) Tahap persiapan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

²⁰Mubiyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 1996), hal. 37

²¹Pranarka dan Moeldjarto, *Pemberdayaan (Empowerment) dalam Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996)

²²Azis Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samuderda Baru, 2012), hal. 35-37

b) Tahap assessment. Pada tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.

c) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d) Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan kepada pihak penyandang dana.

e) Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng data di lapangan.

f) Tahap evaluasi. Pada tahap ini sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.

g) Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi seharusnya dilakukan jika masyarakat sasaran sudah bisa mandiri, bukan dilakukan karena penyanggah dana telah menghentikan bantuannya.

2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.²³

Pemberdayaan ekonomi melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pemberdayaan merupakan jalan terobosan yang akan mempercepat transformasi kegiatan sosial non-ekonomi menjadi suatu usaha ekonomi. Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor penting yang ada pada keluarga, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin dicapainya.²⁴

²³Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal. 1-2

²⁴*Ibid.*, hal. 3

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedangkan pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.²⁵

3. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Konsep pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan yang lebih mengaksentuasikan sifat-sifat “*people centered, participatory improving and sustainable*” (terpusat, partisipasi aktif dan berkelanjutan).²⁶ Konsep ini dikembangkan banyak ahli dan praktisi untuk mencapai upaya yang disebut “*alternatif development*” (alternatif pembangunan) yang menghendaki “*inclusive democracy*” (demokrasi inklusif), *appropriate economic growth, gender equality and*

²⁵Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002)

²⁶Kartasmita, Ginanjar, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, (Jakarta:Bappenass, 1996) hal. 249

intergenerational equality” (pertumbuhan ekonomi yang tepat, kesetaraan gender dan kesetaraan antar generasi).²⁷

Bila dibandingkan dengan laki-laki, kaum perempuan lebih banyak dihadapkan pada jaringan-jaringan kekuasaan yang merangkap mereka pada citra baku yang justru menggelisahkan mereka.²⁸

Konsep pemberdayaan sebagaimana paradigma juga telah dikaji oleh Moser menurut Moser strategi pemberdayaan sesungguhnya bukan bermaksud menciptakan perempuan yang lebih unggul dibandingkan dengan kaum pria. Pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya peningkatan kekuasaan perempuan, namun pendekatan ini lebih berupaya untuk mengidentifikasi kekuasaan bukan sekedar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.²⁹

B. Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Islam

Konsep pemberdayaan dalam Islam adalah kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkarya dengan tetap melaksanakan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Tidak selalu harus dalam bentuk bekerja di luar rumah, menjadi wanita karir, atau pencari nafkah secara utuh bagi keluarga. Keutamaan seorang perempuan adalah yang mampu berkarya di dalam

²⁷*Ibid.*, hal. 251

²⁸Dzuhayatin, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, dalam buku *Sungkar Peran Gender*, Irwan Abdullah, (Yogyakarta: PKK-UGM, 1996)

²⁹Moser, C.O.N, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training (terjemahan Hartian Silawati)*, (London/New York: Routledge, 1993)

rumah, menciptakan rumah tangga yang harmonis, dan mendidik generasi penerus menjadi generasi yang berkualitas.

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan mengenai konsep peran yang khusus untuk laki-laki maupun perempuan, kecuali dalam batas-batas yang menyangkut hal-hal yang sangat khas untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak, sambi; menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan saling tolong-menolong. Al-Qur'an cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan masing-masing manusia untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, damai dan harmonis. Yang menjadi perhatian Al-Qur'an adalah adanya jaminan keamanan terhadap mereka, baik atas nama norma agama maupun norma sosial.³⁰

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada diri perempuan bertumpu pusat pendidikan dan pembinaan generasi. Eksistensi perempuan sebagai diri pribadi, istri, ibu dan bagian dari masyarakat menuntut untuk menjadi perempuan yang produktif dan berkualitas sehingga keberadaan perempuan menjadi berdaya dan tidak menjadi manusia lemah seperti yang dikhawatirkan Rasulullah SAW terhadap kaumnya apabila ditinggalkannya.

Salah satu jalan untuk memulai pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan keilmuan dan kecerdasannya. Karena hanya dengan kecerdasan menurut Alfin Toffler akan membantu manusia dalam

³⁰M. Quraish Shihab, *"Kesetaraan Gender dalam Islam: kata pengantar Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an"*, oleh Nasarudin Umar, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 37

menganalisis problem, sehingga mampu mengintegrasikan informasi dan menjadi lebih mandiri, dan imajinatif.³¹

1. Unsur-unsur Pemberdayaan Perempuan

Terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:³²

a) *Welfare* (Kesejahteraan)

Kesejahteraan dikatan salah satu unsur yang terpenting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi kedalam tiga unsur utama, berikut uraiannya: *pertama, partisipasi ekonomi perempuan* merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. *Kedua, pencapaian pendidikan* merupakan aspek paling fundamental dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik. *Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan* merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang

³¹Alfin Toffler, *Gelombang Ketiga*, (Jakarta: Pantja Simpati, 1992), hal. 2

³²Kaber dalam Mayoux, Linda, *Gender Equity, and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework*, (Aga Khan Fondation, diakses dari situs <http://www.gefinances.net>,2001) pada 31 Oktober 2019 pukul 19.06 WIB

cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi, dan untuk mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas seseorang.

Unsur-unsur kesejahteraan di atas selaras dengan konsep ekonomi Islam yaitu “kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material”.³³ Kesejahteraan dalam ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah *Al-Falah* yaitu kemenangan, keberuntungan.

b) Access (Akses)

Akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan laki-laki. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek yang penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia.

c) Consientisation (Konsientisasi)

Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender. Pemahaman dalam islam disebut juga berilmu.

³³M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abisin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 2-3

d) Participation (Partisipasi)

Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam pemformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka.³⁴ Dalam islam salah satu upaya pemberdayaan adalah melalui pemberian zakat, pemberian zakat wajib dilaksanakan bagi seluruh muslim baik laki-laki maupun perempuan.

e) Equality of Control (Kesetaraan dalam kekuasaan)

Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan.

C. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Status Ekonomi Keluarga

Pengertian kalimat “status ekonomi keluarga”. Status berarti keadaan atau kedudukan dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga.

Status sosial pada ekonomi keluarga dalam masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya. Dalam konteks ini Soerjono Soekanto mengutip keterangan Aris Toteles “Bahwa di dalam tiap-tiap

³⁴*Ibid.*, hal. 4

Negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya”.³⁵

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis, semua manusia dianggap sama derajatnya, akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial tidak demikian, perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Pada umumnya warga lapisan atas (*Upper-class*) tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (*Middle-class*) dan lapisan bawah (*Lower-class*).

2. Aspek-aspek Ekonomi Keluarga

Menurut penjelasan di atas, di dalam bermasyarakat terdapat tiga lapisan ekonomi yang berbeda yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi tidak mampu.

a) Ekonomi keluarga mampu

Marx mengatakan “selama masyarakat masih terbagi kedalam kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah yang akan terhimpun segala kekuasaan dan kekayaan. Ukuran atau kriteria yang bisa di pakai untuk menggolongkan anggota masyarakat kedalam suatu lapisan adalah

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke empat, 1990), hal. 251

ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan”.³⁶

Ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar sistem lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka tanahlah yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat pembuka tanah dianggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan atas masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari dinamakan elit. Dan biasanya lapisan golongan atas merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang juga mengendalikan masyarakat. Kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakat ini, dan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar.³⁷

b) Ekonomi keluarga sedang

Status ekonomi yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, di dalam golongan ini seseorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status di bawahnya. Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan status di atasnya disebabkan status ini terlalu banyak dalam masyarakat. Pada dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi kebutuhannya seperti

³⁶Soekanto, *Sosiologi sesuatu...*hal. 263

³⁷*Ibid.*, hal. 264

kebanyakan keluarga lainnya, hanya saja yang membedakan adalah tingkat fasilitas yang digunakan berbeda dengan fasilitas ekonomi yang di atasnya.

c) Ekonomi keluarga tidak mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin). Biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga pemukiman masyarakat yang tertinggal.

Adanya sejumlah teori yang dikolaborasikan berkaitan dengan kemiskinan dan kelas sosial, ringkasnya teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu berfokus pada tingkah laku individu dan yang mengarah pada struktur sosial. Teori tingkah laku merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan kapital manusia. Pandangan struktural bertolak belakang dengan pendapat tersebut, dan diawali dengan baik oleh teori kelompok Marxiz, yaitu “Bahwa hambatan-hambatan struktural yang sistematis telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutan penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis”.³⁸

Singkatnya teori perilaku individu meyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan. Di sisi lain, teori struktural sosial menyatakan bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan perilaku tertentu pada setiap individu, misalkan sikap

³⁸Abad Badruzaman, Lc, mAg, *Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 135

individu yang tidak produktif merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan miskin.

D. Kemiskinan

Secara teoritik, kemiskinan dipahami melalui akar penyebabnya dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yaitu suatu kemiskinan yang timbul akibat terbatasnya sumber atau tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Kedua, kemiskinan buatan (*artifisial*), yaitu struktur sosial yang ada membuat masyarakat tidak dapat menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Faktor-faktor yang membedakan kemiskinan natural dan kultural adalah, jika kemiskinan natural disebabkan oleh keadaan alamiah seperti cacat, sakit, lanjut usia dan bencana alam. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang kurang merata.³⁹

Ada tiga pendekatan yang cukup populer dalam memahami kemiskinan yang dikemukakan oleh Jamaludin Ancok, yaitu: pertama, pendekatan kultural, dengan konsep *cultural povety* yang memandang kemiskinan sebagai suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama. Inilah kemudian dipakai oleh orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap posisi mereka yang marjinal dalam masyarakat yang memiliki kelas-kelas dan bersifat individualistik dan kapitalistik. Kedua, pendekatan situasional yang mengasumsikan bahwa masyarakat miskin timbul karena adanya stuktur total dari sistem sosial yang ada di dalam

³⁹Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

masyarakat yang menekan mereka (kemiskinan struktural). Ketiga, pendekatan interaksional dengan asumsi bahwa sebagian orang miskin diakibatkan oleh warisan generasi sebelumnya dan sebagian yang lainnya hanya miskin secara periodik.⁴⁰

E. Teori Pendampingan

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada subyek yang mengalami situasi sulit dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah. Serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga, kemandirian subyek secara berkelanjutan dapat diwujudkan.⁴¹

Selain itu, pendampingan juga dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan subyek dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses subyek terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan.

Proses relasi sosial antara pekerja sosial yang memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta lainnya dengan subyek dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam

⁴⁰Ancok, Jamaludin, *Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditiya Media, 1995)

⁴¹ Buku Pedoman Direktorat Bantuan Sosial, 2007:4

pemenuhan kebutuhan hidup. Serta meningkatkan akses subyek terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah. Lebih dari itu mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian subyek secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

F. Program Jalin Matra sebagai Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah Jawa Timur memfokuskan diri untuk mengatasi masalah kemiskinan yang misinya “makin sejahtera dan makmur bersama wong cilik”, merupakan misi dari Gubernur Jawa Timur yakni Soekarwo yang kerap dipanggil Pakde Karwo dan juga wakilnya Saifulloh Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul. Dari Misi “makin sejahtera dan makmur bersama wongcilik” ini direalisasikan oleh Pemerintah Jawa Timur melalui program yang disebut dengan program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera).

Pada tahun anggaran 2015 ini, Program Jalin Matra PK2 masih merupakan *Pilot Project*, yang secara khusus membidik kelompok rumah tangga yang berada pada desil 2 dan desil 3 atau mereka yang berada dalam kategori kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM). Dalam konseptualisasinya Robert Chambers kelompok RTM tersebut lazim disebut sebagai kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin.⁴²

⁴² Pemprov Jatim, “*Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan*” yang diakses melalui <http://bapemas.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpk2> (pada tanggal 12 September 2019, pukul 19.02 WIB)

Secara sederhana, kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin lazim digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang rapuh, ringkih dan tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang melanda kehidupannya, misalnya adanya kenaikan harga kebutuhan barang sehari-hari (sembako), kebutuhan untuk mengobati anggota keluarganya yang sakit, gagal panen, adanya bencana alam, dan berbagai tekanan yang lain yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam melakukan survival. Oleh James Scott, betapa rentannya kehidupan mereka digambarkan sebagai “orang yang telah terendam ke dalam kolam air sampai sebatas leher, sehingga ombak yang sekecil apa pun telah mampu menenggelamkannya”.

Melalui *Pilot Project* Jalin Matra PK2, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berniat untuk menolong kelompok masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan 3 agar tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan, atau kelompok desil 1.

Secara esensial, RTM yang berada di desil 2 dan 3 adalah rumah tangga yang dalam kesehariannya sebenarnya relatif cukup mampu dalam mencukupi kebutuhannya, tetapi jika ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhinya.

Sejalan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka *Pilot Project* Jalin Matra PK2 juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat posisi desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi

kesenjangan pembangunan. Oleh karena itu melalui Jalin Matra PK2 diharapkan akan memperkuat keberadaan kelembagaan baru di pedesaan, yang disebut dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dalam konteks ini, Jalin Matra PK2 akan menempatkan BUMDesa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pedesaan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu target Jalin Matra PK2 Prov. Jatim adalah “1000 Desa 1000 BUMDesa”.

Pilot Project Jalin Matra PK2 ini memiliki kekhususan dalam pengelolaannya, yaitu : dikelola untuk pengembangan potensi ekonomi produktif, sesuai dengan ekonomi spesifik kawasan, dilakukan secara kompetisi yang sehat, berbasis potensi lokal, mengedepankan kreativitas dan kearifan lokal, dana yang diberikan dilakukan secara bergulir, dan dilakukan secara berkelanjutan.

Jalin Matra merupakan kepanjangan dari “*Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera*”. Program ini dipandang dapat menjadi upaya dan strategi pemajuan ekonomi bagi perempuan. Jalin Matra seringkali dilirik oleh pemerintah baik daerah maupun tingkat Nasional sebagai program penanggulangan feminisasi kemiskinan⁴³.

Salah satu daerah yang cukup optimal menjalankan program ini adalah Jawa Timur⁴⁴. Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan JALIN MATRA ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 14 Tahun

⁴³ *Ibid.*, hal. 21.

⁴⁴ Adapun penelitian ini terpusat di daerah Gondang Kabupaten Tulungagung, salah satu kecamatan yang ada di provinsi Jawa Timur. Tentu kebijakan daerah Jawa Timur untuk menjalankan program Jalin Matra terasa hingga kota-kota kecil seperti Tulungagung.

2017 tentang Pedoman Umum Program Jalin Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Dalam Peraturan Gubernur tersebut lampiran 2 yang khusus menjadi pedoman umum dalam penanggulangan feminisasi kemiskinan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat secara inklusif, partisipatif, berpihak pada rakyat miskin dan adanya gender mainstreaming di dalamnya.

Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya⁴⁵.

Manajemen PFK JALIN MATRA dalam formulasi dan pelaksanaannya berprinsip pada perspektif gender, partisipasi deliberatif, keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, beraspek human governance dan keterpaduan. PFK JALIN MATRA dilaksanakan dengan kegiatan di dalamnya mencakup pendataan rumah tangga miskin berkepala rumah tangga perempuan. Data KRTP diambil dari data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang

⁴⁵ Nanang Cendriano, *Pendampingan Program Jalin Matra Feminisasi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Desa Nglanduk kecamatan Wugu Kabupaten Madiun*, Jurnal Pengabdian Masyarakat ADIMAS, Vol 1. No 1, Maret tahun 2017, hal. 18

dilakukan oleh stakeholder TNP2K. Selanjutnya dari data yang telah ada stakeholder pelaksana PFK JALIN MATRA melakukan uji data untuk memverifikasi data kepala rumah tangga perempuan. Uji data dilakukan secara terbuka lewat forum langsung bersama masyarakat untuk memverifikasi data yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar program tepat sasaran⁴⁶.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini, adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Kabul Setio Utomo dan Tiyas Nur Haryani ⁴⁷	“Mengurangi Feminisasi Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan (Kajian pada Program PFK Jalin Matra)”	Hasil penelitian mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan feminisasi kemiskinan khususnya untuk kepala rumah tangga perempuan. Melalui kajian lapangan yang dilakukan, Kabul serta Tiyas menemukan bahwa program Jalin Matra dalam	Persamaan penelitian terletak pada aspek yang mengangkat tema pemberdayaan kepala rumah tangga perempuan dalam menanggulangi kemiskinan.	Perbedaan terletak pada sumber lokasi yang diteliti.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 22-23.

⁴⁷ Kabul Setio Utomo, Tiyas Nur Haryani, *Mengurai Feminisasi Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan (Kajian pada Program PFK Jalin Matra)*, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol. 3, No. 1 April 2019

			implementasinya cukup optimal		
2	Nanang Cendriono ⁴⁸	“Pendampingan Program Jalin Matra Feminisasi Kemiskinan Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Desa Nglanduk Kec. Wugu, Kab. Madiun”	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan penjarangan data calon sasaran dalam pelaksanaan jalin matra Penanggulangan feminisasi Kemiskinan (PFK), Desa Nglanduk memiliki KRTP dengan tingkat kesejahteraan 10% terendah sebanyak 20 (dua puluh) rumah tangga. Sehingga dengan adanya pendampingan proses pelaksanaan Program yang tepat sasaran.	Persamaan penelitian terletak pada sasaran penelitian yaitu kepada kepala perempuan rumah tangga yang dikategorikan miskin.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yakni hanya pada pendampingan program jalin matra sementara fokus penelitian yang peneliti teliti adalah pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui program jalin matra
3	Zulfa Ulin Nuha ⁴⁹	“Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga	Hasil penelitian menunjukkan Keterlibatan semua pihak pelaksanaan dari jajaran provinsi hingga desa sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan	Persamaan penelitian adalah fokus penelitian yang terletak pada peran pemberdayaan ekonomi perempuan	Perbedaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yakni pada lokasi yang diteliti.

⁴⁸ Nanang Cendriono, *Pendampingan Program Jalin Matra Feminisasi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Desa Nglanduk kecamatan Wugu Kabupaten Madiun*, Jurnal Pengabdian Masyarakat ADIMAS, Vol 1. No 1, Maret tahun 2017.

⁴⁹ Zulfa Ulin Nuha, *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar*, Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

		Muslim di Kabupaten Blitar”	program.		
4	Dina Asmaul Husna ⁵⁰	“Efektivitas Program Jalin Matra Terhadap Kesejahteraan Janda Miskin Desa Sumberjo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Ekonomi Islam”	Hasil penelitian diperoleh bahwa program Jalin Matra di Desa Sumberjo sudah efektif dan kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan pangan dan papan sehingga sudah bisa dikatakan sejahtera dengan adanya peningkatan aset usaha atau pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan pendapatan RTS (Rumah Tangga Sasaran)	Persamaan penelitian terletak pada problema dalam meningkatkan aset usaha atau pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan pendapatan RTS (Rumah Tangga Sasaran)	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian peneliti terdahulu yakni efektivitas program jalin matra terhadap kesejahteraan janda miskin. Sementara yang peneliti teliti adalah tidak hanya efektifitasn program jalin matranya saja tetapi juga pemberdayaan ekonomi, bentuk pendampingan yang dilakukan melalui program jalin matra.
5	Ni Nyoman Putri Novitasari dan	“Manajemen Strategi Program Jalan Lain Menuju	Hasil penelitian yakni bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Persamaan penelitian terletak pada bentuk penelitian yaitu	Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian

⁵⁰ Dina Asmaul Husna, *Efektivitas Program Jalin Matra Terhadap Kesejahteraan Janda Miskin Desa Sumbergempol Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Ditinjau dari Ekonomi Islam*, Martabat, Jurnal Perempuan dan Anak Vol. 2, No. 2, Desember 2018

	Meirinawati ⁵¹	Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) melalui Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang”	dan Desa Kabupaten Jombang sudah menerapkan program Jalin Matra PK2 dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wringinpitu.	penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	terdahulu fokus pada relevansi Manajemen Strategi Program Jalin Matra Sementara penelitian ini fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program Jalin Matra dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Rejosari Kabupaten Tulungagung.
--	---------------------------	---	--	---	---

⁵¹ Ni Nyoman Putri Novitasari dan Meirinawati, *Manajemen Strategi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) melalui Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang*, Jurnal Simki-Techsain Vol. 01 No. 11 Tahun 2017

H. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

